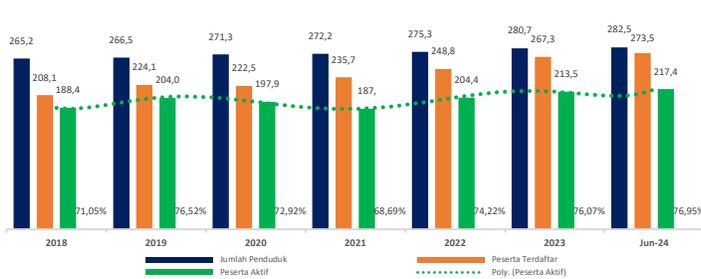


Monthly Report Monitoring JKN

31 Juni 2024

Kepesertaan dan Kesehatan Keuangan

Jumlah Penduduk, Peserta Terdaftar, Peserta Aktif (dalam juta jiwa)



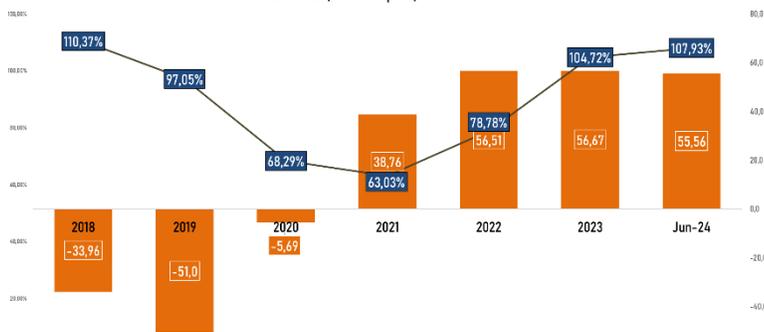
Sumber : Ditjen Dukkapol Kemendagri dan BPJS Kesehatan, diolah

No	Segmen Peserta	Juni 2024			Total
		Aktif	Non Aktif Menunggak	Non Aktif Mutasi	
A.	Penerima Bantuan Iuran	96.580.707		19.343.211	115.923.918
B.	Bukan Penerima Bantuan Iuran				
1	PPU Penyelenggara Negara	18.503.664	2.584	1.155.551	19.661.799
2	PPU Non Penyelenggara Negara	36.320.278	155.498	8.887.613	45.363.389
a.	BUMN	1.398.405	238		1.398.643
b.	BU Swasta	34.921.873	155.260		35.077.133
3	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	16.720.776	14.806.664	1.469.789	32.997.229
4	Bukan Pekerja (BP)	5.111.376	37.770	497.617	5.646.763
a.	BP Penyelenggara Negara (BP PN)	4.673.135		443.390	
b.	BP Swasta	438.241	37.770	54.227	
	Total B	76.656.094	15.002.516	12.010.570	103.669.180
C.	PBPU Pemda	44.131.091		9.801.161	53.932.252
	Total Peserta	217.367.892	15.002.516	41.154.942	273.525.350

Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

Kepesertaan non aktif sebesar 56,16 juta jiwa atau 20,5% dari total peserta. Peserta non aktif bertambah 2,39 juta jiwa dibanding 31 Desember 2023. Peserta non aktif dikarenakan menunggak sejumlah 15 juta, terbanyak adalah dari segmen PBPU Mandiri sebesar 14,8 juta. Disisi yang lain, peserta non aktif dikarenakan proses mutasi sejumlah 41,15 juta, yang terdiri dari 19,34 juta dari segmen PBI, disebabkan verifikasi dan validasi data PBI. Sebesar 9,8 juta dari segmen PBPU Pemda, disebabkan inaktivasi peserta PBPU Pemda oleh Pemda. Sebesar 8,9 juta dari PPU Non PN disebabkan oleh mayoritas akumulasi PHK, dan 1,15 juta peserta non aktif mutasi segmen PPU PN, dan diikuti segmen yang lain.

Aset Neto (triliun rupiah) Rasio Klaim



Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

Aset Neto DJS Kesehatan diproyeksikan dapat membiayai 3,82 bulan kedepan dan masih dalam koridor sehat sebagaimana PP 53 Tahun 2018 dan ICK DJSN Tahun 2024. **Yol DJS Kesehatan** sebesar 3,40% atau Rp2,74 triliun dengan kelolaan Dana Investasi per Juni 2024 sebesar Rp77,35 triliun, terbagi pada Deposito Rp43,2 triliun (55,85%), dan Surat Utang Negara sebesar Rp34,15 triliun (44,15%), target Yol sebagaimana ICK 2024 sebesar 5,7%.

Dana operasional BPJS Kesehatan sebagaimana Permenkeu Nomor 148 Tahun 2023 paling besar adalah Rp5,7 triliun atau 3,66% dari Iuran program. Realisasi **Beban terhadap Dana Operasional + pendapatan Investasi (BOPO)** per Juni 2024 telah berada diposisi **101,21%**, tingginya rasio BOPO mengindikasikan perlu adanya penyehatan melalui efisiensi anggaran dan optimalisasi investasi BPJS Kesehatan. **Yol BPJS Kesehatan** sebesar 1,50% (neto), dengan perolehan imbal hasil investasi sebesar Rp156,78 miliar dari rata-rata portofolio Investasi BPJS Kesehatan sebesar Rp10,74 triliun. Imbal hasil investasi BPJS Kesehatan sebagaimana ICK Tahun 2024 ditargetkan sebesar 7%.

Cakupan kepesertaan JKN Per 31 Juni 2024 telah mencapai 273,5 juta jiwa atau 96,83% dari total penduduk Indonesia Semester II Tahun 2024, capaian ini masih dalam upaya memenuhi target cakupan kepesertaan tahun 2024 sebagaimana Perpres 36/2023 yang ditargetkan 98%. Cakupan peserta tumbuh 6,2 juta (2,32%) dibanding 31 Desember 2023.

Capaian **kepesertaan aktif** sebesar 217,4 juta jiwa atau 76,95% dari jumlah penduduk, dan 79,47% dari keseluruhan peserta, tumbuh 1,79% atau 3,8 juta jiwa dibanding 31 Desember 2023, rincian penambahan peserta aktif adalah sebagai berikut :

- **PBI JK** -173,02 ribu jiwa (-0,18%)
- **PPUPN** +503,98 ribu jiwa (+2,80 %)
- **PPUBU** +1,02 juta jiwa (+2,89%)
- **PBPU** +506,03 ribu jiwa (+3,12%)
- **BP** -111,62 ribu jiwa (-2,14%)
- **PBPU Pemda** +2,08 juta jiwa (+4,94%)

Kepesertaan non aktif sebesar 56,16 juta jiwa atau 20,5%

sebesar 56,16 juta jiwa atau 20,5% dari total peserta. Peserta non aktif bertambah 2,39 juta jiwa dibanding 31 Desember 2023. Peserta non aktif dikarenakan menunggak sejumlah 15 juta, terbanyak adalah dari segmen PBPU Mandiri sebesar 14,8 juta. Disisi yang lain, peserta non aktif dikarenakan proses mutasi sejumlah 41,15 juta, yang terdiri dari 19,34 juta dari segmen PBI, disebabkan verifikasi dan validasi data PBI. Sebesar 9,8 juta dari segmen PBPU Pemda, disebabkan inaktivasi peserta PBPU Pemda oleh Pemda. Sebesar 8,9 juta dari PPU Non PN disebabkan oleh mayoritas akumulasi PHK, dan 1,15 juta peserta non aktif mutasi segmen PPU PN, dan diikuti segmen yang lain.

Pendapatan iuran JKN tercapai sebesar Rp80,68 triliun atau telah mencapai 50,3% dari target tahun 2024 sebesar Rp160,42 triliun. Realisasi **Beban Jaminan** sebesar Rp87,08 triliun, aktivitas DJS Kesehatan mengalami penurunan aset neto sebesar -Rp1,1 triliun, penurunan aset neto disebabkan oleh beban jaminan yang lebih besar dibanding pendapatan iuran, yang tercermin dari **rasio klaim mencapai 107,93%**. Rasio klaim naik signifikan disebabkan oleh meningkatnya utilisasi layanan kesehatan, khususnya pada Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) dan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL).

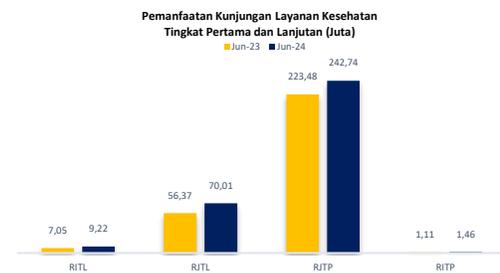
Monthly Report Monitoring JKN

31 Juni 2024

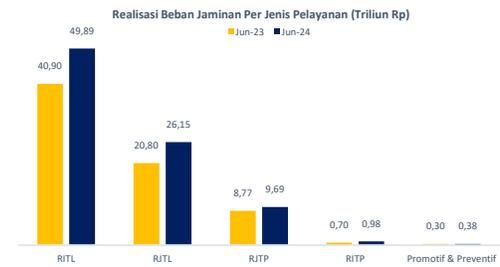
Kerjasama Faskes dan Utilisasi



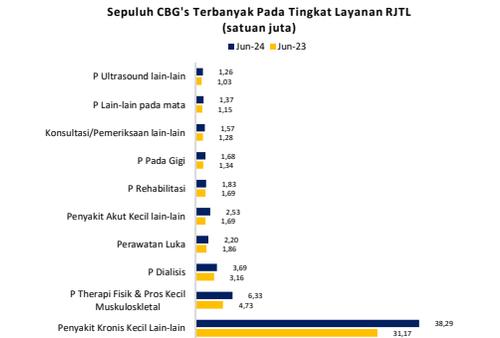
Kerjasama FKTP mengalami penurunan dibanding 31 Desember 2023, Kerjasama dengan FKTP sebanyak 23.194 atau turun sebesar -445 FKTP dibanding 31 Desember 2023. FKTP dokter Praktik Perorangan (DPP) adalah yang terbesar penurunannya, sebesar -240, diikuti Klinik Pratama sebesar -170, secara keseluruhan kerjasama dengan FKTP masih dibawah target ICK DJSN Tahun 2024 sebanyak 23.664 FKTP. Realisasi **kerjasama FKRTL** per Juni 2024 sebesar 3.125 atau bertambah 5 FKRTL dibanding realisasi 31 Desember 2023, dan tersedia Faskes Penunjang berupa 450 Klinik Utama, 4.394 Apotek dan 1.202 Optik.



Pemanfaatan layanan kesehatan per Juni 2024 meningkat sebanyak 12,3% dibanding Juni 2023. Pada Juni 2024, pemanfaatan tertinggi berasal dari Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebesar 242,74 juta kunjungan, mengalami peningkatan 8,6% atau 19,3 juta kunjungan dibanding Juni 2023. Selanjutnya diikuti oleh pemanfaatan layanan kesehatan di Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) sebanyak 70,01 juta kunjungan, meningkat 24,2%. Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) sebanyak 9,22 juta kunjungan, meningkat 30,8% dan pemanfaatan layanan kesehatan terendah terdapat di Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITP) sebanyak 1,46 juta, meningkat 31,5%. Selain itu, jumlah rujukan juga mengalami peningkatan, dari 12,98 juta rujukan pada Juni tahun 2023, meningkat 2,88 juta rujukan menjadi 15,86 juta pada Juni 2024 atau meningkat sebesar 22,19%.



Beban Jaminan pada Juni 2024 mengalami peningkatan 21% dibanding Juni 2023, dari Rp71,48 triliun menjadi Rp87,08 triliun. Alokasi beban jaminan didominasi pada Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) sebesar Rp49,89 triliun atau 57% dari keseluruhan beban jaminan sebesar Rp87,08 triliun, diikuti oleh Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) sebesar 30%, Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) 11%, Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) 1% dan terkecil adalah alokasi promotif dan preventif sebesar 0,4% dari keseluruhan beban jaminan.



Pembayaran manfaat RJTL sampai Juni 2024 mencapai Rp26,15 triliun, naik 25,7% dibanding pembayaran manfaat RJTL pada Juni 2023. Dimana, jumlah kunjungan rawat jalan FKRTL adalah sebesar 70,01 juta kunjungan, dengan diagnosa terbanyak di RJTL yaitu penyakit kronis kecil lain-lain, sejumlah 38,29 juta kasus, kemudian diikuti kunjungan prosedur terapi fisik dan prosedur kecil muskuloskeletal sejumlah 6,33 juta kasus, kunjungan untuk prosedur dialisis mencapai 3,69 juta kasus, diikuti dengan perawatan luka dan lain sebagainya.



Pembayaran manfaat RITL sampai Juni 2024 mencapai Rp49,89 triliun, naik 22% dibanding pembayaran manfaat RITL pada Juni 2023. Dimana, jumlah layanan untuk kasus infeksi non bakteri (ringan) sebanyak 630,8 ribu kasus, diikuti kasus persalinan dengan kode INA CBG's operasi pembedahan caesar ringan mencapai 542,4 ribu kasus, Nyeri Abdomen & Gastroenteritis merupakan 3 terbesar sebanyak 508,4. Diikuti Infeksi bakteri dan parasit lain-lain (ringan) dan simple Pneumonia & Whooping Cough (ringan). Kasus pernafasan lain-lain (ringan) menemptai posisi ke 9 dan diikuti kasus kencing manis dan gangguan nutrisi diurutan ke 10.

Sumber : BPJS Kesehatan, diolah